



## Analisis Kebijakan Sertifikasi Dosen Dan Penguatan Profesionalisme Akademik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rike Junia Ningarumsari<sup>1)</sup>, Ashima Ailya<sup>2)</sup>, Eva Dianawati Wasliman<sup>3)</sup> Iim Wasliman<sup>4)</sup>

Universitas Islam Nusantara<sup>1),2),3),4)</sup>

### Abstract

Received: 02 Januari 2026

Revised: 16 Januari 2026

Accepted: 28 Januari 2026

*The lecturer certification policy has been implemented to enhance academic quality and professionalism in higher education. This study focuses on the implementation of the lecturer certification policy at STIT Al-Ihsan Baleendah and its impact on lecturers' professional practices. The objective is to gain an in-depth understanding of how certification is carried out and its contribution to improving educational quality. This research is grounded in bureaucratic decision-making theory, a systemic approach to public policy, and the concept of academic professionalism. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that the certification policy has encouraged improvements in teaching readiness, involvement in curriculum development, and academic productivity. However, challenges persist, such as the dominance of one-way teaching methods and low motivation among lecturers to engage in research and community service. This study recommends strengthening institutional support, continuous professional development, and contextual evaluation of certification practices within Islamic higher education institutions.*

**Keywords:** *certification policy, academic professionalism, higher education quality, lecturer performance*

(\*) Corresponding Author: [rikearum@gmail.com](mailto:rikearum@gmail.com)<sup>1)</sup>, [ashimaailya12@gmail.com](mailto:ashimaailya12@gmail.com)<sup>2)</sup>  
[evadianawatiwasliman@uninus.ac.id](mailto:evadianawatiwasliman@uninus.ac.id)<sup>3)</sup> [iimwasliman@uninus.ac.id](mailto:iimwasliman@uninus.ac.id)<sup>4)</sup>

**How to Cite:** Ningarumsari, R., Ailya, A., Wasliman, E., & Wasliman, I. (2026). Analisis Kebijakan Sertifikasi Dosen Dan Penguatan Profesionalisme Akademik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(2.B), 110-121. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13746>.

## PENDAHULUAN

Mutu pendidikan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas dosen sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan sertifikasi dosen sebagai langkah strategis untuk memperkuat profesionalisme dosen secara sistemik dan berkelanjutan. Sertifikasi dosen merupakan pengakuan formal atas kompetensi dosen dalam empat bidang utama yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Tujuan program sertifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap dosen memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Sertifikasi diharapkan dapat mendorong

peningkatan mutu akademik dan memperkuat daya saing institusi pendidikan tinggi, bukan hanya sekadar pengakuan administratif.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tantangan implementasi sertifikasi dosen masih cukup tinggi, terutama di lingkungan perguruan tinggi swasta berbasis keagamaan. Berdasarkan laporan *Republika* (2023) lebih dari 30% dosen di PTS keagamaan belum tersertifikasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas pelatihan, lemahnya dukungan kelembagaan serta minimnya akses terhadap pendampingan profesional. Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan sertifikasi telah dirumuskan dengan baik, implementasinya di tingkat institusi belum sepenuhnya efektif.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi dosen memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan produktivitas akademik. Sertifikasi terbukti mendorong dosen untuk lebih siap dalam melaksanakan tugas mengajar, aktif dalam mengembangkan bahan ajar, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan publikasi ilmiah (Ramli, 2021). Penelitian Andriani juga menemukan bahwa dosen tersertifikasi menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Andriani & Yusuf, 2022). Namun, berbagai penelitian juga mengungkap adanya tantangan dalam implementasi kebijakan sertifikasi dosen. Penelitian Nugroho (2023) menggarisbawahi bahwa ketimpangan pelaksanaan sertifikasi masih terjadi, terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan lemahnya manajemen kelembagaan. Hal ini diperkuat oleh temuan Sari dan Mustofa (2021) yang menunjukkan bahwa sertifikasi belum sepenuhnya berdampak pada perubahan pola pikir dosen dalam mengembangkan profesionalismenya secara mandiri.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan sertifikasi dengan realitas pelaksanaannya di tingkat institusi pendidikan tinggi. Sertifikasi di satu sisi menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas dosen namun di sisi lain, implementasinya belum menjamin tercapainya profesionalisme akademik yang diharapkan. Hal ini terutama terjadi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan swasta yang seringkali menghadapi kendala administratif, lemahnya budaya akademik serta minimnya akses terhadap pelatihan dan pendampingan profesional. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini disusun untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi dosen dan dampaknya terhadap profesionalisme akademik di STIT Al-Ihsan Baleendah, Kabupaten Bandung. Pemilihan lokus di STIT Al-Ihsan Baleendah dilandasi oleh realitas bahwa institusi ini sedang dalam proses akselerasi mutu dan pembenahan manajemen akademik melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Fokus penelitian diarahkan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan sertifikasi dosen, perubahan yang terjadi dalam praktik profesional akademik sebagai akibat dari implementasi tersebut, serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan model pelaksanaan sertifikasi yang kontekstual serta memperkaya literatur kebijakan pendidikan tinggi, khususnya dalam konteks perguruan tinggi keagamaan swasta. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi kelembagaan yang mampu

mengoptimalkan manfaat sertifikasi untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi secara menyeluruh.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan sertifikasi dosen dan dampaknya terhadap penguatan profesionalisme akademik di STIT Al-Ihsan Baleendah Kabupaten Bandung. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik masalah yang dikaji yaitu menelaah proses, makna dan dinamika kebijakan dari berbagai perspektif di tingkat institusi pendidikan tinggi. Penelitian dilaksanakan selama bulan April hingga Juni 2024 di STIT Al-Ihsan Baleendah, sebuah perguruan tinggi keagamaan swasta yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Subjek penelitian terdiri dari dosen tersertifikasi, kepala program studi, mahasiswa dan staf akademik yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan sertifikasi dosen. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung individu-individu tersebut dalam proses implementasi kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas kelembagaan, rapat akademik serta interaksi dosen dalam proses pembelajaran. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman, persepsi dan pengalaman responden mengenai pelaksanaan sertifikasi dan dampaknya terhadap praktik profesional mereka. Dokumentasi yang dianalisis meliputi dokumen kebijakan internal, laporan kinerja dosen dan hasil evaluasi akademik. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument*, pedoman wawancara dan lembar observasi yang telah disusun berdasarkan indikator dalam kebijakan sertifikasi dosen dan kerangka profesionalisme akademik. Validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, metode dan waktu serta pengecekan kepada beberapa responden kunci.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Data yang diperoleh dari berbagai teknik dikompilasi, dikategorisasi dan ditafsirkan untuk menemukan pola-pola tematik yang merepresentasikan dinamika pelaksanaan kebijakan dan pengaruhnya terhadap profesionalisme dosen. Seluruh tahapan analisis dilakukan secara berulang dan mendalam untuk memastikan bahwa temuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL**

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ihsan Baleendah, yang berlokasi di Jalan Adipati Agung No. 40, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. STIT Al-Ihsan merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berfokus pada pengembangan ilmu-ilmu keislaman melalui pendidikan tinggi yang berkualitas dan profesional. Kampus ini berada di bawah naungan Yayasan Miftahul Jannah dan telah dikenal sebagai institusi yang berkontribusi dalam mencetak tenaga pendidik Islam yang unggul dan berkarakter.

STIT Al-Ihsan Baleendah memiliki visi besar, yaitu: "Mewujudkan Perguruan Tinggi yang unggul dalam ilmu-ilmu keislaman dan agen

perubahan dalam membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, berdaya saing tinggi dan terdepan dalam mengintegrasikan keislaman, keilmuan dan teknologi di tahun 2025." Visi ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan akademik, termasuk penguatan kapasitas dosen melalui kebijakan sertifikasi. Adapun misi STIT Al-Ihsan Baleendah mencakup empat hal utama:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas untuk mengembangkan sumber daya manusia yang profesional.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan aspek keislaman, keilmuan, dan teknologi.
3. Menyediakan layanan pengabdian kepada masyarakat berbasis keislaman dan profesionalitas dalam berbagai aspek kehidupan.
4. Membangun tata kelola perguruan tinggi (good governance) yang berorientasi pada pelayanan prima dan penguatan peran sivitas akademika.

STIT Al-Ihsan menyelenggarakan dua program studi sarjana (S1), yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Kedua program studi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tenaga pendidik dan pengelola pendidikan yang tidak hanya menguasai teori dan praktik pendidikan, tetapi juga memiliki integritas keislaman yang kuat. STIT Al-Ihsan Baleendah menjadi lokasi yang relevan dengan posisi yang strategis, lingkungan akademik yang mendukung, serta komitmen institusional terhadap mutu pendidikan dan pengembangan SDM serta representatif dalam meneliti implementasi kebijakan sertifikasi dosen dan pengaruhnya terhadap profesionalisme akademik di perguruan tinggi Islam.

1. Observasi Kegiatan Akademik dan Forum Dosen

Hasil observasi terhadap kegiatan perkuliahan menunjukkan bahwa dosen yang telah tersertifikasi umumnya memiliki kesiapan mengajar yang lebih baik. Dosen menggunakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara konsisten dan memanfaatkan media pendukung dalam proses penyampaian materi. Namun demikian, interaksi pembelajaran masih banyak yang bersifat satu arah, komunikasi antara dosen dan mahasiswa belum sepenuhnya partisipatif. Dosen tersertifikasi dalam forum rapat dosen menunjukkan keterlibatan lebih aktif khususnya dalam menyampaikan pandangan terkait evaluasi pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Hal ini mencerminkan bahwa mereka tidak hanya menjalankan fungsi mengajar tetapi juga berperan dalam pengambilan keputusan institusional secara kolektif.

2. Peran dan Perubahan Tugas Tenaga Kependidikan (Tendik)

Menurut tenaga kependidikan di STIT Al Ihsan, sebelum tahun 2024 mereka berperan aktif membantu dosen dalam pengajuan sertifikasi termasuk pengumpulan dan pengunggahan dokumen. Namun, sejak 2024 tanggung jawab tersebut dialihkan sepenuhnya kepada dosen. Tendik kini hanya melakukan validasi administratif. Tendik juga mencatat bahwa dosen yang telah tersertifikasi menunjukkan peningkatan aktivitas dalam bidang penelitian, publikasi dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Meski demikian, mereka menilai bahwa dampak sertifikasi terhadap kualitas pembelajaran masih bervariasi dan belum seragam.

3. Perspektif Mahasiswa terhadap Kinerja Dosen Sertifikasi

Mahasiswa menilai bahwa komitmen dan etos kerja dosen lebih ditentukan oleh karakter personal daripada status sertifikasi semata. Mereka menyadari adanya peningkatan struktur dan kedisiplinan pada dosen tersertifikasi, khususnya dalam penyusunan RPS dan konsistensi mengajar. Namun, mahasiswa juga menyoroti kurangnya interaktivitas dalam proses pembelajaran. Mereka berharap dosen tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu membangun komunikasi dua arah, menggunakan metode pembelajaran variatif, serta lebih dekat dengan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa menekankan bahwa kualitas pengajaran juga sangat ditentukan oleh pendekatan pedagogis, keterlibatan dalam diskusi akademik, dan kemampuan menjembatani teori dengan praktik.

#### 4. Pandangan Kepala Bagian Akademik

Kepala Bagian Akademik mengungkapkan bahwa sertifikasi dosen telah meningkatkan kesadaran administratif, terutama terkait kelengkapan portofolio akademik dan pelaporan tridharma. Namun demikian, belum semua dosen menunjukkan perubahan sikap dan perilaku profesional secara signifikan. Beberapa dosen masih menjalankan tugas akademik secara normatif, bukan sebagai bagian dari aktualisasi diri profesional. Ia menekankan perlunya pelatihan lanjutan pasca-sertifikasi agar sertifikasi tidak semata menjadi tujuan administratif, melainkan menjadi pijakan untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.

#### 5. Pandangan Dosen Terkait Sertifikasi

Salah satu dosen menyampaikan bahwa sertifikasi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan motivasi dosen. Sertifikasi mendorong dosen untuk melakukan minimal satu kegiatan penelitian atau pengabdian setiap tahun yang kemudian berkontribusi terhadap peningkatan akreditasi institusi. Ia juga menjelaskan bahwa kendala utama dalam sertifikasi adalah kebiasaan akademik dosen, khususnya di lingkungan perguruan tinggi swasta, seperti tidak terbiasa menulis, melakukan penelitian, atau menyusun laporan. PKDP sebagai syarat sertifikasi juga dinilai memberatkan karena biaya ditanggung pribadi tanpa subsidi dari yayasan.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dosen antara lain melalui pelatihan penulisan jurnal, sesi berbagi kinerja, pendampingan, dan mendorong kolaborasi dosen-mahasiswa dalam penelitian. Sertifikasi juga memberi dorongan motivasional karena terkait langsung dengan kompensasi dan jenjang karier akademik.

#### 6. Tantangan dan Usulan Kebijakan Sertifikasi

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi sertifikasi di STIT Al Ihsan antara lain adalah:

- a. Tingginya biaya untuk memenuhi syarat PKDP, terutama bagi dosen di perguruan tinggi swasta.
- b. Rendahnya budaya meneliti dan menulis ilmiah.
- c. Kurangnya dukungan kebijakan atau insentif dari pihak yayasan.
- d. Dominasi penilaian administratif tanpa memperhatikan luaran tridharma secara menyeluruh.

Dosen menyarankan agar kebijakan sertifikasi tidak terlalu sering berubah, melainkan lebih difokuskan pada peningkatan kualitas dengan dukungan kebijakan yang lebih inklusif dan subsidi biaya untuk PKDP. Sistem penilaian dosen

sebaiknya tidak hanya berfokus pada kehadiran (absensi), tetapi pada luaran nyata tridharma, seperti publikasi dan pengabdian.

#### 7. Dampak Sertifikasi terhadap Mutu Pendidikan

Sertifikasi mewajibkan dosen menyusun laporan Beban Kerja Dosen (BKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) yang mendorong keterlibatan aktif dalam penelitian dan pengabdian. Dosen yang belum tersertifikasi cenderung pasif karena tidak memiliki beban administratif yang mengikat. STIT Al Ihsan perlu mengembangkan pedoman internal untuk menilai kinerja dosen berbasis tridharma bukan hanya kehadiran di kelas. Namun, keterbatasan anggaran penelitian dan insentif masih menjadi kendala utama terutama dalam partisipasi konferensi dan publikasi artikel ilmiah. Oleh karena itu, penguatan dukungan kelembagaan sangat diperlukan untuk memastikan sertifikasi benar-benar berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Aspek	Temuan Utama
Observasi Perkuliahan	Dosen tersertifikasi lebih siap dan terstruktur dalam mengajar, tetapi komunikasi masih satu arah.
Rapat Dosen	Dosen tersertifikasi lebih aktif terlibat dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum.
Tenaga Kependidikan	Tugas sertifikasi dialihkan ke dosen sejak 2024; dosen tersertifikasi lebih aktif meneliti.
Mahasiswa	Menghargai struktur dan disiplin dosen tersertifikasi, namun menuntut interaksi dan metode belajar yang lebih variatif.
Kepala Akademik	Sertifikasi meningkatkan kesadaran administratif, namun perubahan sikap profesional belum merata.
Dosen	Sertifikasi memotivasi penelitian, namun terkendala budaya akademik dan biaya. Perlu pelatihan dan dukungan kebijakan.
Mutu Pendidikan	Sertifikasi mendorong pelaporan tridharma dan aktivitas akademik; dosen belum tersertifikasi cenderung pasif.

Tabel 3.1 Temuan Penelitian

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pimpinan akademik), proses pengambilan keputusan dalam kebijakan sertifikasi dosen di STIT Al-Ihsan Baleendah menunjukkan beberapa karakteristik penting, sebagai berikut:

### 1. Dominasi Keputusan Top-Down dari Pusat dan Yayasan

Kebijakan sertifikasi dosen sangat dipengaruhi oleh regulasi nasional dan instruksi dari pihak yayasan. STIT Al-Ihsan bersifat *reaktif* dalam mengimplementasikan

kebijakan ini yaitu lebih sebagai pelaksana administratif ketimbang pengambil keputusan strategis yang otonom.

#### 2. Pengambilan Keputusan oleh Dosen

Dosen menunjukkan kecenderungan gaya pengambilan keputusan rasional yakni mempertimbangkan keharusan administratif, tuntutan akreditasi dan peluang peningkatan karier. Namun, proses ini sering terkendala oleh faktor teknis seperti kurangnya kemampuan menulis, keterbatasan dana untuk mengikuti PKDP serta rendahnya budaya penelitian.

#### 3. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi Kolektif

Sertifikasi telah mendorong peningkatan kesadaran administratif namun belum ada sistem pengambilan keputusan berbasis data atau evaluasi kinerja yang bersifat menyeluruh. Penilaian masih bersifat normatif dan individual, tanpa pendekatan sistemik berbasis luaran tridharma.

#### 4. Inisiatif Dosen sebagai Pengambil Keputusan Lokal

Beberapa dosen mulai melakukan inisiatif mandiri sebagai pengambil keputusan dalam penguatan profesionalisme, seperti mengadakan pelatihan penulisan jurnal, kolaborasi penelitian dengan mahasiswa serta berbagi praktik baik. Namun, inisiatif ini masih bersifat pribadi dan belum menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang terstruktur.

#### 5. Kebutuhan akan Pendekatan Keputusan Kolaboratif dan Transformasional

Informan menyampaikan pentingnya mengubah pendekatan pengambilan keputusan dari individual dan administratif menjadi kolaboratif dan transformatif, agar dosen tidak hanya fokus pada pemenuhan syarat formal (sertifikasi), tetapi juga berorientasi pada kualitas luaran tridharma secara berkelanjutan.

Proses pengambilan keputusan terkait kebijakan sertifikasi dosen di STIT Al-Ihsan cenderung bersifat rasional dan administrative tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya akademik kolektif. Transformasi menuju pendekatan yang lebih kolaboratif dan berbasis kualitas masih diperlukan agar sertifikasi benar-benar menjadi instrumen penguatan profesionalisme dan mutu pendidikan tinggi.

#### **Evaluasi Kebijakan yang Diterapkan**

Kebijakan sertifikasi dosen terbukti mampu membangun kesadaran akan pentingnya profesionalisme akademik di kalangan dosen. Namun demikian, dampaknya terhadap peningkatan kualitas akademik secara substantif masih belum merata. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh yang mengintegrasikan kebijakan sertifikasi dengan program peningkatan kapasitas dosen secara sistematis, berkelanjutan dan sesuai dengan konteks institusi. Mahasiswa menilai bahwa peningkatan kualitas dosen tidak dapat hanya bertumpu pada pencapaian sertifikasi semata. Mereka mengharapkan adanya pelatihan yang mendukung peningkatan keterampilan komunikasi, penggunaan pendekatan pembelajaran yang lebih partisipatif, serta kemampuan membangun interaksi yang bermakna dalam proses belajar-mengajar.

Kepala Bagian Akademik turut menekankan urgensi pelatihan lanjutan pasca-sertifikasi, agar pencapaian status formal tidak menjadi tujuan akhir, melainkan sebagai awal dari proses penguatan mutu pengajaran dan penelitian yang berkesinambungan. Salah satu dosen menjelaskan bahwa penguatan profesionalisme juga diupayakan melalui kegiatan konkret, seperti pelatihan penulisan jurnal ilmiah, forum berbagi praktik baik antar dosen, serta

pendampingan dalam pelaksanaan tridharma. Inisiatif kolaborasi riset antara dosen dan mahasiswa juga mulai dibangun untuk mendorong budaya akademik yang lebih aktif dan produktif. Dalam hal kebijakan, dosen menyarankan agar regulasi yang ada saat ini tidak sering mengalami perubahan, tetapi lebih difokuskan pada penyempurnaan implementasi. Ia juga menyoroti perlunya kebijakan afirmatif, khususnya dalam bentuk subsidi atau keringanan biaya, mengingat beban finansial menjadi tantangan utama bagi dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dalam mengikuti program sertifikasi dan PKDP.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan sertifikasi telah menjadi langkah awal yang penting, evaluasi lanjutan perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan tinggi. Hal ini menuntut pendekatan kebijakan yang holistik tidak hanya administratif tetapi juga memfasilitasi peningkatan kompetensi secara nyata melalui pelatihan, penguatan riset dan pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif.

### **Implikasi Terhadap Sektor Pendidikan**

Kebijakan sertifikasi dosen dan penguatan profesionalisme akademik memainkan peran strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada dukungan institusional, regulasi yang berlaku serta terbentuknya budaya akademik yang mendorong kualitas dan kinerja. Salah satu dosen mengungkapkan bahwa sertifikasi membawa dampak signifikan terhadap kewajiban dosen dalam menjalankan tridharma, seperti minimal satu kali kegiatan penelitian atau pengabdian dalam setahun. Hal ini turut memengaruhi proses akreditasi perguruan tinggi karena aspek administratif dosen menjadi salah satu indikator utama penilaian. Sertifikasi pun dijadikan indikator formal untuk menilai kompetensi dosen.

Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama oleh dosen di STIT Al Ihsan Baleendah yang belum terbiasa dalam menyusun laporan, menulis karya ilmiah, serta menjalankan kegiatan penelitian dan pengabdian secara rutin. Selain itu, Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKDP) yang menjadi syarat wajib sertifikasi menimbulkan beban finansial karena proses pengajuan sertifikasi umumnya ditanggung pribadi dan belum mendapat dukungan penuh dari yayasan ataupun pemerintah. Di sisi lain, sertifikasi juga memberi dampak positif terhadap motivasi dan performa dosen. Insentif serta tuntutan administratif memacu dosen untuk lebih giat dalam meningkatkan kompetensi diri, seperti melalui kegiatan penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat. Dengan demikian, kebijakan sertifikasi dosen tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kelembagaan secara keseluruhan, meskipun tetap memerlukan kebijakan pendukung agar dapat diakses secara adil oleh seluruh dosen, terutama di lingkungan PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta).

### **Temuan Utama dan Kaitannya dengan Teori**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data kualitatif yang telah dilakukan, terdapat sejumlah temuan penting yang berkaitan erat dengan proses implementasi kebijakan sertifikasi dosen dan penguatan profesionalisme akademik di STIT Al-Ihsan Baleendah. Temuan-temuan ini tidak hanya mencerminkan kondisi empiris di lapangan, tetapi juga memperlihatkan keterkaitannya dengan

beberapa teori dalam pengambilan keputusan dan analisis kebijakan sektor pendidikan. Dengan demikian, pembahasan berikut ini akan menguraikan temuan utama secara sistematis dan menaungkannya secara langsung dengan teori relevan sebagai landasan analisis, dimulai dari aspek proses pengambilan keputusan hingga implikasinya terhadap sektor pendidikan.

### 1. Analisis Proses Pengambilan Keputusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam kebijakan sertifikasi dosen di STIT Al-Ihsan masih didominasi oleh pola birokratis dan administratif. Hal ini sesuai dengan Teori Birokratik (Dermawan, 2006) kebijakan bersifat top-down dan dilaksanakan tanpa banyak ruang diambil partisipasi lokal. Keputusan dosen untuk mengikuti sertifikasi sebagian besar secara rasional, mempertimbangkan tuntutan administratif, akreditasi dan jenjang karier. Namun, hambatan seperti rendahnya kemampuan menulis dan biaya PKDP menunjukkan adanya keterbatasan dalam proses berpikir optimal, sesuai dengan konsep "bounded rationality" dari Herbert Simon.

Inisiatif individu, seperti pelatihan jurnal dan kolaborasi penelitian, menunjukkan adanya kecenderungan gaya intuitif dan spontan sebagaimana dikemukakan oleh Scott & Bruce. Meski demikian, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi berbasis luaran tridharma memperlihatkan lemahnya pendekatan sistemik dalam pengambilan Keputusan sebagaimana dijelaskan dalam Teori Analisis Sistem. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi menuju pengambilan keputusan yang lebih kolaboratif dan partisipatif, yang sejalan dengan prinsip kebijakan deliberatif dan kepemimpinan transformasional.

### 2. Evaluasi Kebijakan yang Diterapkan

Kebijakan sertifikasi dosen telah meningkatkan kesadaran administratif dan keterlibatan dosen dalam tridharma. Namun, evaluasi efektivitasnya terhadap kualitas akademik belum dilaksanakan secara menyeluruh. Model evaluasi kebijakan menurut Dunn dan Wasliman menekankan pentingnya tahapan evaluasi dan reformulasi yang sistematis. Ketidakhadiran sistem feedback dan monitoring menyebabkan kebijakan berjalan tanpa koreksi berkelanjutan. Mahasiswa menilai bahwa dosen tersertifikasi lebih tertib secara administratif, tetapi belum optimal secara pedagogis. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi substansial dari kualitas pembelajaran belum menjadi fokus utama kebijakan. Pendapat Kepala Akademik dan dosen menguatkan perlunya pelatihan lanjutan dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip evaluasi kebijakan dari Patton & Savicky yang menilai efektivitas dari segi teknis, politis dan ekonomis.

### 3. Implikasi terhadap Sektor Pendidikan

Sertifikasi dosen memberi kontribusi positif terhadap akreditasi institusi dan profesionalisme dosen, khususnya dalam pelaporan tridharma. Hal ini mendukung unsur "effect" dalam Model Kebijakan Pendidikan Charles O. Jones, yang menggarisbawahi pentingnya keterkaitan antara tujuan kebijakan dengan dampak nyata. Namun demikian, dosen di lingkungan PTKIS menghadapi hambatan struktural seperti biaya PKDP dan rendahnya budaya akademik. Keterbatasan ini mencerminkan perlunya kebijakan yang lebih adil dan afirmatif. Implikasi sistemik dari kebijakan ini memperlihatkan bahwa penguatan budaya akademik tidak cukup hanya dengan kewajiban administratif, tetapi harus dibarengi dengan dukungan kelembagaan dan anggaran yang memadai.

Pendekatan sistemik, partisipatif, dan berbasis keadilan menjadi syarat utama agar kebijakan sertifikasi dosen tidak hanya menjadi kewajiban administratif semata, tetapi bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dan merata. Pendekatan sistemik, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Analisis Sistem, menekankan perlunya integrasi antarkomponen seperti regulasi, pelatihan, pendanaan, dan budaya akademik agar kebijakan dapat menghasilkan output yang konsisten dan berkualitas. Sementara itu, pendekatan partisipatif yang tercermin dalam Model Kebijakan Deliberatif menggarisbawahi pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk dosen, mahasiswa, dan lembaga pengelola pendidikan dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Pendekatan berbasis keadilan sebagaimana diusulkan oleh Wasliman, menuntut adanya afirmasi kebijakan, khususnya dalam hal subsidi biaya, dukungan kelembagaan dan pemerataan akses bagi dosen baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di seluruh Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Kebijakan sertifikasi dosen di STIT Al Ihsan Baleendah masih dijalankan dalam kerangka pengambilan keputusan yang cenderung *top-down*, mengikuti regulasi nasional dan instruksi yayasan tanpa pelibatan signifikan dari level institusi. Keterbatasan teknis seperti kemampuan menulis ilmiah, biaya program PKDP dan lemahnya budaya meneliti turut menghambat optimalisasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan teori *bounded rationality* (Herbert Simon) dan pendekatan birokratis (Dermawan) yang menekankan keterbatasan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi mendorong peningkatan kesadaran administratif dampaknya terhadap kualitas akademik belum sepenuhnya merata. Mahasiswa dan tenaga kependidikan menggarisbawahi pentingnya pelatihan lanjutan, penggunaan metode pembelajaran partisipatif dan konsistensi kebijakan di tingkat lembaga. Berdasarkan model evaluasi kebijakan dari Dunn dan Wasliman, keberhasilan kebijakan menuntut integrasi yang erat antara sertifikasi dan penguatan kapasitas kelembagaan. Secara umum, kebijakan sertifikasi dosen berkontribusi positif dalam membangun profesionalisme akademik, terutama dalam pelaporan kinerja dan keterlibatan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, tantangan seperti tingginya biaya program, kurangnya subsidi dan lemahnya budaya akademik masih menjadi hambatan serius khususnya di lingkungan perguruan tinggi keagamaan swasta. Oleh karena itu, kebijakan sertifikasi perlu dikembangkan secara lebih sistemik, partisipatif dan berbasis keadilan sosial agar dapat berfungsi sebagai instrumen transformasional bukan sekadar administratif.

Berdasarkan simpulan tersebut, terdapat beberapa implikasi penting, baik secara praktis maupun teoretis yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam perbaikan kebijakan dan pengembangan studi di masa mendatang.

### **1. Implikasi Praktis**

- a. STIT Al-Ihsan Baleendah perlu menyusun sistem evaluasi kinerja dosen berbasis luaran tridharma, menyelenggarakan pelatihan rutin terkait penulisan ilmiah dan pembelajaran aktif, serta membentuk kelompok kerja dosen untuk mendorong kolaborasi akademik.

- b. Penting bagi dosen untuk menumbuhkan kesadaran akan sertifikasi sebagai bagian dari pengembangan profesional jangka panjang, terlibat aktif dalam pelatihan dan publikasi ilmiah, serta mengembangkan metode pembelajaran yang lebih partisipatif dan kontekstual.
- c. Yayasan dan Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) perlu membentuk kebijakan yang mendorong kinerja berbasis hasil, pemberian subsidi parsial untuk program sertifikasi, serta penguatan peran LPMI dalam membina budaya akademik institusi.
- d. Pemerintah dan atau pembuat kebijakan perlu memperhatikan afirmasi terhadap dosen di PTKIS, penyelarasan antara program PKDP dan kebutuhan lapangan, serta integrasi sertifikasi dengan sistem penjaminan mutu internal yang kontekstual dan berkelanjutan.

## 2. Implikasi Teoretis dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya

### a. Implikasi Teoretis

Hasil penelitian ini menegaskan relevansi teori *bounded rationality* dan model evaluasi kebijakan (Dunn, Charles O. Jones, dan Wasliman) dalam menganalisis implementasi kebijakan di sektor pendidikan tinggi. Penelitian lanjutan dapat memperluas penggunaan model kebijakan partisipatif dan transformasional yang lebih adaptif terhadap konteks PTKIS.

### b. Pengembangan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, untuk kajian selanjutnya peneliti merekomendasikan pendekatan *mixed methods* untuk mengukur secara kuantitatif dampak sertifikasi terhadap kinerja tridharma. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi perspektif pembuat kebijakan di tingkat nasional serta dampak jangka panjang kebijakan terhadap tata kelola dan reformasi regulasi pendidikan tinggi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R., & Yusuf, M. (2022). Keterlibatan Dosen Tersertifikasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(2), 110–120. <https://siberpublisher.org/JKMT/article/download/82/62/>
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 68-69.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, A. (2023). Ketimpangan Pelaksanaan Sertifikasi Dosen di PTS Keagamaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 55–65. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/92334>
- Pasolong, H. (2023). *Teori Pengambilan Keputusan*. Bandung: Alfabeta.
- Permenristekdikti No. 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
- Ramli, H. (2021). Dampak Sertifikasi Dosen terhadap Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 18(2), 70–78.
- Republika. (2023, November 10). Sertifikasi Dosen Masih Belum Merata di PTS Keagamaan. *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/rleducation123>

- Sari, F., & Mustofa, R. (2021). Tantangan Perubahan Pola Pikir Dosen dalam Sertifikasi. *Swara Justisia*, 9(1), 45–52.  
<https://swarajustisia.unespadaang.ac.id/index.php/ujsj/article/view/194>
- Wasliman, I. (2015). *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Winarno, B. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.